



# **RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2026**

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara  
Jl. H.M. Said No. 27 Medan  
Telp. (061) 4527254  
Website : [diskominfo.sumutprov.go.id](http://diskominfo.sumutprov.go.id)  
E-mail : [diskominfo@sumutprov.go.id](mailto:diskominfo@sumutprov.go.id)**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 ini dapat diselesaikan. Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2026 ini berdasarkan usulan program dan kegiatan dari setiap bidang yang sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 -2029.

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) sebagai Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang memuat kebijakan, program dan kegiatan dalam satu tahun yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 serta untuk mereviu hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan..

Demikian atas tersusunnya Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat dan pedoman yang dapat digunakan sebagaimana apa yang telah direncanakan

Medan, 2025

Plt. Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika  
Provinsi Sumatera Utara,



Pomti Juanda Marpomari Mahulae, ST, M.Si  
Penata Tingkat  
NIP. 198009152010011015

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman :</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	6
1.4. Sistematika Penulisan.....	6
<b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOMINFO PROVSU TAHUN LALU .....</b>	<b>7</b>
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kominfo Provsu Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	26
2.3. Isu-isu Strategis Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	29
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	31
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	44
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....</b>	<b>45</b>
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	45
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kominfo Provsu .....	52
3.3. Program dan Kegiatan.....	53
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>59</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>70</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan sinergitas dan akselerasi pencapaian tujuan (comon goals) dan Pembangunan yang telah dirumuskan bersama dan menjadi komitmen semua pihak maka setiap perangkat Daerah harus menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) yang merupakan pedoman perencanaan Pembangunan tahunan yang sah dan harus dilaksanakan.

Menurut Undang Tahun Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara perubahan rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah, rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra OPD ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah adalah merupakan dokumen perencanaan OPD untuk 1 (satu) tahun.

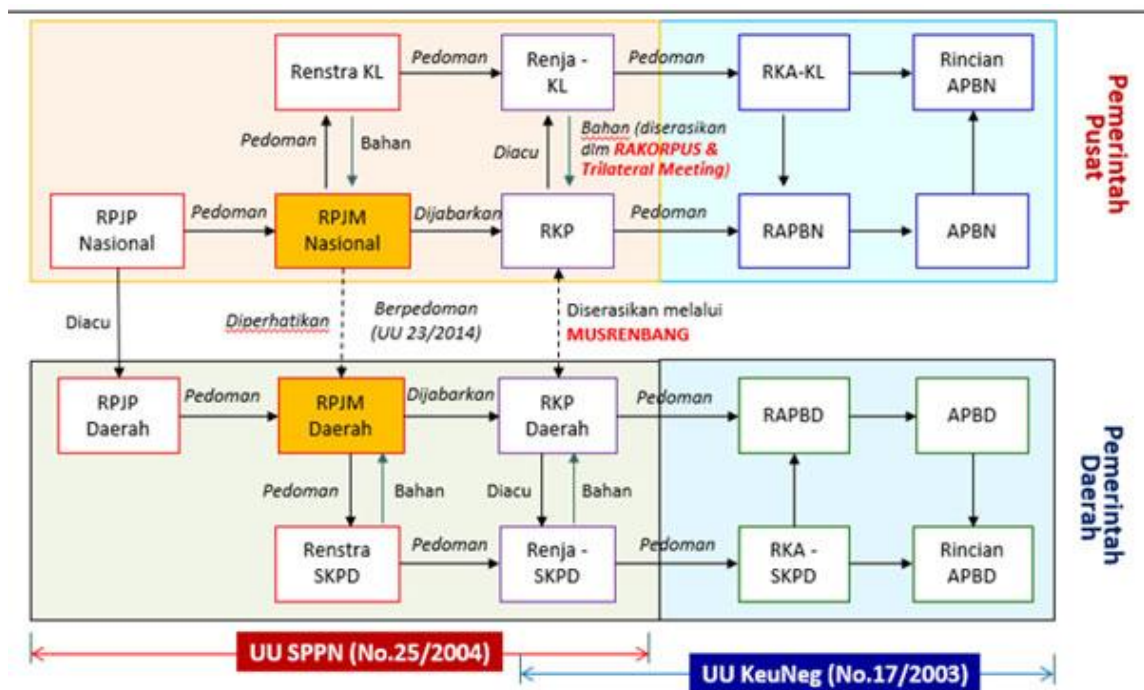
Penyusunan Renja dimaksudkan bertujuan untuk melihat sejauh mana program dan kegiatan yang telah dilaksanakan berhasil atau tidak melalui evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dengan mengacu RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2025-2029 serta Rancangan Akhir Renstra OPD Dinas Kominfo Tahun 2025-2029.

Rancangan Renja Perangkat Daerah dibahas pada forum Perangkat daerah yang dikoordinasikan oleh Bappeda dimana pembahasan tersebut meliputi penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang.

Keterkaitan antara Renja perangkat daerah dengan dokumen RKPD bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, yang memuat sasaran dan strategi pembangunan

nasional selama 5 (lima) tahun masa pemerintahan. Untuk menjabarkan serta mewujudkan amanat pembangunan jangka menengah, diperlukan dokumen perencanaan pembangunan Daerah yang dapat menjadi acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) disusun mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Pusat dan merupakan Penjabaran dari RPJM Daerah. RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, dengan demikian, Rrenja Organisasi Perangkat Daerah berpedoman kepada RKPD Provinsi.

Gambar. Bagan alur Keterkaitan dokumen Perencanaan



Keterkaitan antar dokumen perencanaan berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 ini dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut: Perencanaan Penganggaran Jangka Panjang Jangka Menengah Jangka Pendek Pusat Daerah RPJP Nasional RPJM Nasional Renstra KL RPJP Daerah Renstra RKPD Renja KL RKP RAPBN Nasional RPJM Daerah RKPD RAPBD Renja Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD) disusun mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Pusat dan merupakan Penjabaran dari RPJM Daerah. RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Kritikan dalam penyusunan RKPD dalam hal ini adalah keterlibatan masyarakat. Penyusunan RPJP dan RPJM Daerah yang berjangka panjang dan menengah saja diatur supaya melibatkan masyarakat secara aktif. Penyusunan RKPD yang berjangka waktu tahunan dan produk perencanaan yang paling up to date serta langsung dapat dirasakan masyarakat, penyusunannya justru tidak diatur harus melibatkan masyarakat. Demikian pula dengan kekuatan hukum bagi RKPD itu yang dapat ditetapkan hanya dengan Peraturan Kepala Daerah, padahal dokumen RKPD itu menjadi acuan bagi penyusunan RAPBD dan RAPBD memiliki kekuatan hukum ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Untuk penganggaran program atau kegiatan di daerah dalam undang – undang ini tercermin dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Penyusunan RAPBD dalam peraturan perundangan ini mengacu pada Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah (RKPD)

## **1.2. Landasan Hukum**

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (LPP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

14. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;
15. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025- 2045
18. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 64);
19. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara
20. Surat Edaran Gubernur Sumatera Utara Nomor. 000.7.2/2264/2025 tentang pedoman Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud kegiatan penyusunan Rencana Kerja adalah untuk mengefektifkan proses pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam perencanaan kinerja tahunan.

Adapun tujuan penyusunannya adalah sebagai acuan pelaksanaan program kegiatan dalam melaksanakan sesuai tupoksi, untuk memberikan arahan atau acuan serta pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan untuk tercapainya tujuan dan sasaran.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

## **BAB I PENDAHULUAN**

Berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

## **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS TAHUN LALU**

Memuat tentang hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.

## **BAB III MAKSUD DAN TUJUAN PERANGKAT DAERAH**

Memuat telaahan terhadap kebijakan Nasional, tujuan dan sasaran Renja Dinas, Program dan Kegiatan.

## **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Memuat tentang Rencana Kerja beserta Pendanaan Program dan Kegiatan Diskominfo Provinsi Sumatera Utara.

## **BAB V PENUTUP**

## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN LALU

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kominfo Provsu tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyusunan Rencana Kerja yang lebih baik, efektif dan akuntabel, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana kerja tahun sebelumnya guna mengetahui keberhasilan dan kegagalan serta menjadi referensi dalam melakukan langkah-langkah perbaikan. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Dinas Kominfo Provsu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2024 yang meliputi :

1. Realisasi program / kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program / kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program / kegiatan yang melebihi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan;
4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD; dan
5. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Lebih lanjut, jika dilihat dari aspek serapan (realisasi) keuangan Dinas Kominfo Provsu tahun 2024 , berdasarkan program, maka dapat diperoleh data sebagai berikut :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi , pagu anggaran sebesar Rp. 33.666.251.368,- dengan realisasi Rp. 31.598.319.332,- Capaian kinerjanya sebesar 93,86 %
- 2) Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pagu anggaran sebesar Rp.17.439.191.525,- dengan realisasi Rp. 16.951.167.887,-, Capaian kinerjanya sebesar 97,20 %
- 3) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika pagu anggaran sebesar Rp.8.339.026.547,- dengan realisasi Rp. 8.252.998.177,- Capaian kinerjanya sebesar 98,26 %
- 4) Program Penyelenggaraan Statistik pagu anggaran Rp. 225.416.700,- dengan realisasi Rp. 221.879.900,- Capaian kinerjanya sebesar 98,43 %
- 5) Program Penyelenggaraan Persandian dan Keamanan Informasi pagu anggaran Rp. 246.656.350,- dengan realisasi sebesar Rp.236.856.390,-. Capaian kinerjanya sebesar 96,03 %

**I. Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan**

Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara tahun 2024 semua terlaksanakan sesuai dengan target yang ditetapkan.

**I. Realisasi program / kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan**

Untuk realisasi program dan kegiatan . Adapun program / kegiatan yang telah disesuaikan dengan Permendagri 90 Tahun 2019 yang memenuhi target kinerja hasil / keluaran adalah :

**A. Program Rutin**

**I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi meliputi**

**Kegiatan :**

**1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

**Sub Kegiatan :**

- Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- Evaluasi Kinerja perangkat Daerah

**2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD

**3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan :

- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi  
Administrasi Umum Perangkat Daerah

**4. Administrasi Umum Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD

**5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Sub Kegiatan :

- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

#### **6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

#### **6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

### **B. Program Operasional**

#### **1. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik**

**Kegiatan :**

- a) Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi

Sub Kegiatan :

- Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
- Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
- Pengelolaan Media Komunikasi Publik
- Pelayanan Informasi Publik
- Layanan Hubungan Media
- Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan

- Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah
- Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas

## **2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika**

Kegiatan :

a). Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain diLingkup Pemerintah Daerah Provinsi

Sub Kegiatan :

- Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

b). Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi

Sub Kegiatan :

- Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi
- Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
- Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas
- Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik

## **3. Program Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral**

Kegiatan :

a) Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi

Sub Kegiatan :

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
- Membangun Metadata Statistik Sektoral
- Penyelenggaraan Otoritas Statistik

#### **4. Program Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi**

Kegiatan :

- a) Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi

Sub Kegiatan :

- Penetapan kebijakan Tata kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi
  - Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
- b). Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi dan Perangkat Daerah Provinsi.
- \* Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi

#### **II. Program / kegiatan Dinas Kominfo Provsu yang tidak terlaksana**

Untuk program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2024 terlaksana sesuai dengan yang direncanakan.

#### **III. Realisasi program / kegiatan yang melebihi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan;**

Pada tahun 2024 program / kegiatan yang melebihi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan tidak ada.

#### **IV. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD**

target kinerja sasaran dan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Utara yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara. Adapun implikasi yang timbul terhadap target capaian program Rencana Strategis adalah :

- 1). terlaksananya operasional Dinas Kominfo Provsu melalui Program

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; 2). Terpublikasinya informasi kepada masyarakat melalui media elektronik, media cetak, dan media online melalui program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, 3). Terhimpunnya data statistik Sektoral dari OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Program Penyelenggaraan Statistik sektoral ; 4) Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui Program Pengelolaan Aplikasi Informatika; 5) Peningkatan indeks keamanan Informasi melalui Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Tabel T.C 29  
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2025  
Provinsi Sumatera Utara

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2026 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan		
				Target Renja SKPD tahun 2024	Realisasi Renja SKPD tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	(10)=(5+7+9)	(11)=(10/4)	
<b>I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI</b>	<b>Persentase pemenuhan layanan administrasi</b>	<b>95 Persen</b>	<b>95 Persen</b>	<b>95 Persen</b>	<b>95 Persen</b>	<b>100</b>	<b>95 Persen</b>			
<b>1. Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Yang Dihasilkan</b>	<b>33 Dokumen</b>	<b>11 Dokumen</b>	<b>11 Dokumen</b>	<b>11 Dokumen</b>	<b>100</b>	<b>11 dokumen</b>	<b>33 dokumen</b>	<b>100</b>	
1	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100	2 dokumen	6 dokumen	100
2	<i>Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD</i>	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	6 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100	2 dokumen	6 dokumen	100

3	<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	100	7 dokumen	21 dokumen	100
<b>2.</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Yang Dihasilkan</b>	<b>57 Laporan</b>	<b>19 Laporan</b>	<b>19 Laporan</b>	<b>19 Laporan</b>	<b>100</b>	<b>19 dokumen</b>	<b>5 dokumen</b>	<b>54</b>
1	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	36 bulan	100
2	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	"Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD"	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	3 dokumen	100
3	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	54 dokumen	18 dokumen	18 dokumen	18 dokumen	100	18 dokumen	54 dokumen	100
<b>3.</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>36 Bulan</b>	<b>12 bulan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>12 bulan</b>	<b>100</b>	<b>12 bulan</b>	<b>36 bulan</b>	<b>100</b>

1	<i>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	36 Orang	-	12 Orang	-	-	2 orang	2 orang	16
4.	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Tersedianya Adminstrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>36 Bulan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>100</b>	<b>12 bulan</b>	<b>36 bulan</b>	<b>100</b>
1	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	36 bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 bulan	100	12 bulan	36 bulan	100
2	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36 bula	12 Bulan	12 Bulan	12 bulan	100	12 bulan	36 bulan	100
3	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	36 bula	12 Bulan	12 Bulan	12 bulan	100	12 bulan	100	100
4	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	36 bula	12 Bulan	12 Bulan	12 bulan	100	12 bulan	100	100
5	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 bula	12 Bulan	12 Bulan	12 bulan	100	12 bulan	100	100

6	<i>Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 bulan	100	12 bulan	100	100
5.	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	36 bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 bulan	36 bulan	100
1	<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	36 bulna	12 Bulan	12 Bulan	12 bulan	100	12 bulan	36 bulan	100
6.	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	36 bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 bulan	100	12 bulan	36 bulan	100
1	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36 bulna	12 Bulan	12 Bulan	12 bulan	100	12 bulan	36 bulan	100
2	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 bulan	100	12 bulan	36 bulan	100

3	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 bulan	100	12 bulan	36 bulan	100
7.	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	36 bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 bulan	100	12 bulan	36 bulan	100
1	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36 bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 bulan	100	12 bulan	36 bulan	100
2	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	36 bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 bulan	100	12 bulan	36 bulan	100
3	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	36 bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 bulan	100	12 bulan	36 bulan	100

II.	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>Terwujudnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik</b>	<b>89 Persen</b>	<b>87 Persen</b>	<b>87 Persen</b>	<b>87 Persen</b>	<b>100</b>	<b>90 Persen</b>		
1.	<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi</b>	<b>Tersebarinya informasi dan kebijakan tentang program prioritas pemerintah</b>	<b>4488 dokumen</b>	<b>167 dokumen</b>	<b>1448 dokumen</b>	<b>1448 dokumen</b>	<b>100</b>	<b>1472 dokumen</b>	<b>3087 dokumen</b>	<b>69</b>
1	<i>Monitoring Opini dan Aspirasi Publik</i>	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	108 dokumen	20 Dokumen	18 Dokumen	18 Dokumen	100	12 dokumen	50 dokumen	46
2	<i>Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik</i>	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	4200 dokumen	98 dokumen	1384 Dokumen	1384 Dokumen	100	1400 dokumen	2882 dokumen	69
3	<i>Pengelolaan Media Komunikasi Publik</i>	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	36 dokumen	12 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100	12 dokumen	30 dokumen	83
4	<i>Pelayanan Informasi Publik</i>	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	36 dokumen	12 Dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100	12 dokumen	36 dokumen	100
5	<i>Layanan Hubungan Media</i>	Jumlah Layanan Hubungan Media	36 Layanan	12 Layanan	7 Layanan	7 Layanan	100	12 Layanan	31 layanan	86
6	<i>Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan</i>	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	36 dokumen	1 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	100	12 dokumen	22 dokumen	61

7	<i>Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah</i>	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	36 dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100	12 dokumen	36 dokumen	100
III.	<b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi</b>	<b>93 Persen</b>	<b>93 Persen</b>	<b>93 Persen</b>	<b>93 Persen</b>	<b>100</b>			
1.	<b>Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain diLingkup Pemerintah Daerah Provinsi</b>	<b>Pengelolaan Jumlah Domain dan Sub Domain di Lingkungan Pemprov</b>	<b>36 Bulan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>100</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>36 Bulan</b>	<b>100</b>
1	<i>Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah</i>	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	36 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	36 bulan	100
2.	<b>Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi</b>	<b>Terkelolanya e-Government di Provinsi Sumatera Utara</b>	<b>93 Persen</b>	<b>93 Persen</b>	<b>93 Persen</b>	<b>93 Persen</b>	<b>100</b>			
1	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	6 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	3 dokumen	50
2	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	6 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100	1 Unit	3 unit	50

3	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	6 sistem informasi	-	2 sistem informasi	-	-			
4	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City	6 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 dokumen	3 dokumen	50
5	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	6 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	-	
6	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik Yang Terhubung Dengan Sistem Peghubung Layanan Pemerintah Daerah	15 Layanan	-	-	-	-	-	-	-
<b>IV.</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	<b>Terwujudnya data statistik sektoral</b>	<b>90 Persen</b>	<b>90 Persen</b>	<b>90 Persen</b>	<b>90 Persen</b>	<b>100</b>			

<b>1.</b>	<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi</b>	<b>Terlaksananya Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkungan Pemprovsu</b>	<b>1094 dokumen</b>	<b>100 dokumen</b>	<b>67 dokumen</b>	<b>67 dokumen</b>	<b>100</b>	<b>565 dokumen</b>	<b>282 dokumen</b>	
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	671 Dokumen	100 Dokumen	57 Dokumen	57 Dokumen	100	100 dokumen	257 dokumen	40
2	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	60 Dokumen	-	10 dokumen	10 dokumen	100	15 dokumen	25 dokumen	50
4	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik	12 Unit	-	-	-	-	-	-	-
5	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	240 Orang	60 Orang	60 Orang	-	-	50 orang	110 Orang	45

	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Proses satu data Indonesia	Jumlah kegiatan statistic sectoral yang dilengkapi dengan meta data	163 dokumen	-	-	-	-	225 dokumen	-	-
	Pelaksanaan proses Bisnis Statistik Sektoral sesuai standar	Jumlah ststistik sectoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina data Statistik	200 dokumen	-	-	-	-	225 dokumen	-	-
	Peningkatan peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Sektoral Nasional	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistic untuk Perencanaan, monitoring dan Evaluasi Pembangunan dari Penyusun kebijakan	50 persen	-	--	-	-	50 persen	-	-
	Peningkatan Kualitas data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik Sektoral yang rilis tepat waktu	50 persen	-	-	-	-	50 persen	-	-
<b>V.</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	<b>Terwujudnya peningkatan persandian dan keamanan informasi</b>	<b>89 Persen</b>	<b>88 Persen</b>	<b>88 Persen</b>	<b>88 Persen</b>	<b>100</b>			

1.	<b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi</b>	<b>Terwujudnya peningkatan persandian dan keamanan informasi</b>	<b>36 Bulan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>100</b>	<b>14 Laporan</b>		
1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 dokumen	3 dokumen	100
2	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	8 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100	1 laporan	6 laporan	75
3	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	-	-	12 Laporan	24 laporan	66
4	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	42 Perangkat Daerah	10 Perangkat Daerah	10 Perangkat Daerah	-	-	42 OPD	42 OPD	100

2	<b>PENETAPAN POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI ANTAR PERANGKAT DAERAH PROVINSI</b>	<b>Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaringan Komunikasi Sandi</b>	<b>42 Perangkat Daerah</b>	10 Perangkat Daerah	10 Perangkat Daerah	10 Perangkat Daerah	<b>100</b>	42 Perangkat Daerah		
1	Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaringan Komunikasi Sandi	<b>42 Perangkat Daerah</b>	10 Perangkat Daerah	10 Perangkat Daerah	10 Perangkat Daerah	100	42 Perangkat Daerah	42 Perangkat Daerah	100

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD**

Untuk mencapai pelayanan yang optimal, pemerintahan daerah selaku penyelenggara urusan harus dapat memproses dan melaksanakan hak dan kewajiban berdasarkan asas-asas pemerintahan yang baik (good Government). Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas KOMunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara menyelenggarakan 3 (tiga) urusan yaitu Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Statistik dan Urusan Persandian.

Pencapaian kinerja yang diraih Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024, sebesar 100 % dengan kategori sangat tinggi, Capaian kinerja pelayanan Dinas Kominfo Provsu pada tahun 2024 berdasarkan Indikator Kinerja Pada RPJMD adalah sebagai berikut :

**Tabel T-C. 30**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**  
**Provinsi Sumatera Utara**

No	Sasaran	SPM / standar nasional	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian ( %)			Catatan Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	11			12
1	Meningkatnya penyebaran Informasi publik		Persentase khalayak yang terpapar informasi terkait program dan kebijakan pemerintah daerah termasuk konten tematik, dan agenda prioritas Nasional) tema : protokol kesehatan, vaksin, stunting, dll) sesuai strategi komunikasi	80 %	81 %	82 %	80 %	-		
2	Meningkatnya Kualitas Data Pembangunan Sumatera Utara		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar	91 %	92 %	93 %	91 %	-		

3	Meningkatnya Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Persentase masyarakat (termasuk ASN dan Pelaku Usaha) yang mendapatkan literasi dan/atau sosialisasi SPBE yang difasilitasi oleh Dinas	2 %	2 %	2 %	2%	-		
4	Meningkatnya Pengelolaan Persandian dan keamanan Informasi daerah		Jumlah lulusan peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan siber	5 Orang	10 orang	15 orang	5 Orang	-		

## **2.3. Isu-isu Strategis Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

### **2.3.1. Tingkat Kinerja Pelayanan OPD**

Pada bahasan sebelumnya, telah dijelaskan bahwa secara umum kinerja pelayanan SKPD Dinas Kominfo Provsu sudah menunjukkan hasil yang optimal, baik dari pencapaian sasaran kinerja RPJMD, maupun IKU OPD. Namun demikian, masih terdapat isu – isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kominfo Provsu terkait kinerja pelayanan OPD yaitu :

1. Belum Optimalnya sarana dan Prasarana TIK
2. Belum Optimalnya penyebaran informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah
3. Pengembangan infrastruktur satu data digital daerah
4. Ancaman keamanan informasi dari berbagai sumber seperti peretasan, virus komputer dan kegagalan sistem seiring dengan adanya percepatan transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintah
5. Rendahnya SDM aparatur dibidang Persandian dan statistik

Tingkat pelayanan Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara dengan Dinas Komunikasi dan Infomatika Kabupaten/kota dalam hal koordinasi dan sinergitas program dan kegiatan yang ada di Provinsi Sumatera Utara dengan berpedoman kepada Permendagri nomor 90 Tahun 2019.

### **2.3.2. Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Dinas Kominfo Provsu**

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi Dinas Kominfo Provsu dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya adalah:

1. Infrastruktur TIK yang belum memadai
2. Perkembangan informasi dan Komunikasi yang begitu pesat dan cepat
3. Masih terbatasnya SDM aparatur dibidang TIK, Persandian dan Statistik

4. Indeks keamanan informasi masih rendah
5. Masih rendahnya Tingkat Kesadaran OPD terhadap penerapan satu data Indonesia dalam pengelolaan data statistik sektoral

### **2.3.3. Dampak Isu-isu strategis terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Capaian Program Nasional**

Dampak yang ditimbulkan dari adanya isu-isu strategis bidang kominfo, yaitu kurang maksimalnya pelayanan pemerintah dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik, baik dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih hal ini sesuai dengan Misi ke 2 (dua) yaitu Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya Pemerintah yang bersih dan dicintai, tata kelola Pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan memiliki kohesisosial yang kuat serta harmonis. hal ini dapat dilaksanakan melalui implementasi e-government dan pemanfaatan TIK .

### **2.3.4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD**

Adapun tantangan yang dihadapi Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara dalam meningkatkan pelayanan adalah :

1. Globalisasi informasi yang berdampak pada keterbukaan informasi publik
2. Pengintegrasian data statistik
3. kemajuan perkembangan TIK
4. Rendahnya SDM dibidang TIK, Statistik dan Persandian
5. Pengamanan Informasi

Sedangkan peluang yang bisa diambil Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara dari tantangan tersebut adalah :

- 1) Tersedianya media informasi dan komunikasi untuk didayagunakan
- 2) Peningkatan kualitas pelayanan Publik
- 3) Peningkatan pelaksanaan SPBE

- 4) Pelatihan dan Bimtek dibidang TIK< Persandian dan Statistik
- 5) Pengembangan Pengamanan Informasi

### **2.3.5. Formulasi isu-isu penting / rekomendasi**

Dari penjabaran isu – isu penting di atas, dapat direkomendasikan hal –hal sebagai berikut sebagai alternatif /upaya pemecahan masalah, yaitu :

1. Adanya instruksi Gubernur Sumatera Utara Nomor. 188.54/1/INST/2019 tentang pelaksanaan Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik.
2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 08 tahun 2019 tentang penyelenggaraan Urusan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika
3. Pelaksanaan pelatihan bagi Aparatur dibidang TIK, Persandian dan Statistik

### **2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rencana kerja bisa berjalan sesuai dengan apa diharapkan apabila sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada. Dokumen perencanaan daerah terdiri dari : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis OPD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja OPD dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Dokumen perencanaan tersebut merupakan dasar dalam melaksanakan program / kegiatan pembangunan agar dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Telaah terhadap Rancangan awal RPD Tahun 2026, dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian Renstra Dinas Kominfo dengan hasil pencapaian target tahunan. Untuk anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara dengan 5 (lima) program, 12 sub kegiatan dan 45 Sub kegiatan dengan pagu sebesar Rp. **70.502.478.891,-**

Tabel T.C 31

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Provinsi Sumatera Utara

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika										
	<b>Dinas Komunikasi dan Informatika Provsu</b>										
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI</b>	<b>Kota Medan</b>	<b>Persentase pemenuhan layanan administrasi</b>	<b>93 %</b>	<b>29.325.002.782</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI</b>	<b>Kota Medan</b>	<b>Persentase pemenuhan layanan administrasi</b>	<b>93%</b>	<b>25.193.299.005</b>	
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Medan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Yang Dihasilkan	10 dokumen	108.050.900	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Medan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Yang Dihasilkan	10 dokumen	51.250.900	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Medan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	77.165.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Medan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	22.200.000	
2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Medan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	19.655.900	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Medan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	19.655.900	

3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Medan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 laporan	11.230.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Medan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 laporan	9.395.000	
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Medan	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Yang Dihasilkan	15 laporan	10.738.796.300	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Medan	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Yang Dihasilkan	15 laporan	10.738.796.300	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Medan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	63 orang	10.683.709.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Medan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	63 orang	10.683.709.000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Medan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	40.599.350	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Medan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	40.599.350	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Kota Medan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 laporan	14.487.950	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Medan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 laporan	14.487.950	
C	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Medan	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Medan	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 orang	773.528.531	

1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Medan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 orang	-	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Medan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	773.528.531	
D	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Medan	Tersedianya Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	957.387.551	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Medan	Tersedianya Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	3.296.956.146	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Medan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket	13.622.390	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Medan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket	13.722.390	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Medan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	73.103.583	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Medan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	73.103.583	
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Medan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	77.120.178	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Medan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	52.731.778	
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Medan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	17.875.900	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Medan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	23.233.500	
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Medan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	288 dokumen	45.071.500	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Medan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	288 dokumen	45.071.500	

6	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Medan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1265 laporan	730.594.000	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Medan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1265 laporan	3.089.093.395	
E	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Medan	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 unit	9.765.643.326	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Medan	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 unit	<b>1.361.024.620</b>	
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Medan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 unit	9.765.643.326	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Medan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 unit	1.361.024.620	
F	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Medan	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	236 laporan	7.116.591.445	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Medan	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	236 laporan	7.391.619.248	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Medan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	200 laporan	4.850.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Medan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	200 laporan	14.000.000	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Medan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 laporan	512.500.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Medan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 laporan	512.500.000	

3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Medan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	6.599.241.445	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Medan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	6.865.119.248	
G	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Medan	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	52 unit	638.533.260	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Medan	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	52 unit	<b>1.580.123.260</b>	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Medan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50 unit	568.038.992	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Medan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50 unit	1.368.038.992	
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Medan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	6.394.268	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Medan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	6.394.268	
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Medan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	1 unit	64.100.000	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Medan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	1 unit	205.690.000	
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>Sumatera Utara</b>	<b>Terwujudnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik</b>	<b>87 %</b>	<b>8.300.263.300</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>Sumatera Utara</b>	<b>Terwujudnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik</b>	<b>87 %</b>	<b>17.275.461.000</b>	

A	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Sumatera Utara	Tersebar nya Informasi dan Kebijakan Tentang Program Prioritas Pemerintah	12 Bulan	8.300.263.300	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Sumatera Utara	Tersebar nya Informasi dan Kebijakan Tentang Program Prioritas Pemerintah	12 Bulan	17.275.461.000	
1	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini dan Aspirasi Publik	Sumatera Utara	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	36 Rekomendasi	333.795.000	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini dan Aspirasi Publik	Sumatera Utara	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	36 Rekomendasi	1.141.105.000	
2	Penyusunan Konten	Provinsi Sumatera Utara	Jumlah Konten Informasi Publik	900 Konten	152.040.000	Penyusunan Konten	Provinsi Sumatera Utara	Jumlah Konten Informasi Publik	900 Konten	750.640.000	
3	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Sumatera Utara	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis Pengelolaan Media Komunikasi Publik	12 Media	2.033.575.000	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Sumatera Utara	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis Pengelolaan Media Komunikasi Publik	12 Media	11.172.882.700	
4	Pelayanan Informasi Publik	Kota Medan	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	12 Permohonan	40.500.000	Pelayanan Informasi Publik	Kota Medan	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	12 Permohonan	537.500.000	

5	Relasi Media	Sumatera Utara	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	50 Laporan	164.000.000	Relasi Media	Sumatera Utara	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	50 Laporan	755.510.000	
6	Penguatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Komunikasi Publik	Kota Medan	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	12 Orang	11.100.000	Penguatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Komunikasi Publik	Kota Medan	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	12 Orang	9.000.000	
7	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam rangka penyelesaian sengketa informasi publik	Kota Medan	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	12 Laporan	1.917.153.300	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam rangka penyelesaian sengketa informasi publik	Kota Medan	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	12 Laporan	2.902.823.300	
8	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Kota Medan	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	12 Komunitas	3.648.100.000	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Kota Medan	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	12 Komunitas	6.000.000	

III	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Kota Medan	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi	93 %	7.333.328.793	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Kota Medan	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi	93 %	18.490.212.170	
A	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Kota Medan	Terkelolanya e-Government di Provinsi Sumatera Utara	12 bulan	7.333.328.793	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Kota Medan	Terkelolanya e-Government di Provinsi Sumatera Utara	12 bulan	18.490.212.170	
1	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Kota Medan	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali	1 Laporan	2.606.134.946	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Kota Medan	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali	1 Laporan	1.714.400.000	
2	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Kota Medan	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	1 Aplikasi	40.221.127	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Kota Medan	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	1 Aplikasi	50.221.127	
3	Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE pemerintah daerah	Kota Medan	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	1 dokumen	37.708.000	Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE pemerintah daerah	Kota Medan	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	1 dokumen	240.092.668	

4	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan	Kota Medan	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	1 Aplikasi	10.200.000	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan	Kota Medan	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	1 Aplikasi	12.200.000	
5	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas	Kota Medan	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Provinsi Cerdas	-	-	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas	Kota Medan	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Provinsi Cerdas	1 dokumen	8.733.979.375	
6	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Kota Medan	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	1 dokumen	19.200.000	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Kota Medan	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	1 dokumen	411.719.000	
7	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	Kota Medan	Jumlah Perangkat Daerah di pemerintah provinsi yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	42 Perangkat Daerah	4.619.864.720	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	Kota Medan	Jumlah Perangkat Daerah di pemerintah provinsi yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	42 Perangkat Daerah	7.327.600.000	
<b>IV</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	<b>Kota Medan</b>	<b>Terwujudnya data statistik sektoral</b>	<b>94 %</b>	<b>320.259.800</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	<b>Kota Medan</b>	<b>Terwujudnya data statistik sektoral</b>	<b>94 %</b>	<b>1.822.186.190</b>	
A	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Kota Medan/Provinsi Sumatera Utara	Terlaksananya Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkungan Pemprowsu	12 bulan	320.259.800	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Kota Medan/Provinsi Sumatera Utara	Terlaksananya Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkungan Pemprowsu	12 bulan	1.822.186.190	

1	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	Kota Medan/Provinsi Sumatera Utara	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	50%	20.100.000	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	Kota Medan/Provinsi Sumatera Utara	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	50%	288.874.450
2	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Kota Medan/Provinsi Sumatera Utara	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	50%	20.100.000	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Kota Medan/Provinsi Sumatera Utara	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	50%	246.624.450
3	Pengelolaan kegiatan statistik sektoral dalam sistem statistik nasional	Kota Medan/Provinsi Sumatera Utara	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	98%	197.700.000	Pengelolaan kegiatan statistik sektoral dalam sistem statistik nasional	Kota Medan/Provinsi Sumatera Utara	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	98%	734.813.940
4	Peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral	Kota Medan/Provinsi Sumatera Utara	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	50 orang	13.400.000	Peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral	Kota Medan/Provinsi Sumatera Utara	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	50 orang	305.248.900
5	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Kota Medan/Provinsi Sumatera Utara	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	10%	68.959.800	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Kota Medan/Provinsi Sumatera Utara	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	10%	246.624.450
<b>V</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	<b>Medan</b>	<b>Terwujudnya peningkatan persandian dan keamanan informasi</b>	<b>89 %</b>	<b>423.624.526</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	<b>Medan</b>	<b>Terwujudnya peningkatan persandian dan keamanan informasi</b>	<b>89 %</b>	<b>7.721.320.526</b>

A	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Kota Medan	Terselenggaranya Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	12 bulan	390.524.526	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Kota Medan	Terselenggaranya Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	12 bulan	7.687.820.526
1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Kota Medan	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah.	-	-	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Kota Medan	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	1 dokumen	188.600.000
2	Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Kota Medan	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	1 laporan	100.000.000	Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Kota Medan	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	1 laporan	300.000.000
3	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kota Medan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	42 laporan	200.524.526	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kota Medan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	42 laporan	7.109.220.526
4	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Kota Medan	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	4 perangkat daerah	90.000.000	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Kota Medan	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	4 perangkat daerah	90.000.000

B	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Provinsi	Kota Medan	Terlaksananya Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	12 Bulan	33.100.000	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Provinsi	Kota Medan	Terlaksananya Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	12 Bulan	33.500.000	
1	Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Kota Medan	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah.	1 Kegiatan	33.100.000	Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Kota Medan	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah.	1 Kegiatan	33.500.000	
				<b>JUMLAH</b>	<b>45.702.479.201</b>				<b>JUMLAH</b>	<b>70.502.478.891</b>	

## **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD. Didalam rancangan awal Renja ini untuk usulan yang sifatnya ke masyarakat Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara tidak mengakomodir .

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Kebijakan Nasional Pembangunan bidang Komunikasi dan Informatika diarahkan pada upaya mendukung pencapaian kedaulatan pangan, kecukupan energi, pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan, pembangunan infrastruktur, percepatan pembangunan daerah perbatasan, dan peningkatan sektor pariwisata dan industri, berlandaskan keunggulan sumber daya manusia dan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Untuk mendukung kebijakan nasional tersebut maka sesuai dengan kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis, yaitu:

- a. Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung focus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran Negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan
- b. Tersedianya akses broadband nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan
- c. Terselenggaranya tata kelola Komunikasi dan Informatika yang efisien, berdaya saing, dan aman
- d. Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola yang berintegritas, bersih, efektif, dan efisien

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

Pada Urusan Komunikasi dan Informatika Kebijakan tentang pentingnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di lingkungan pemerintahan, baik pusat maupun daerah yang setiap tahunnya dievaluasi oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur

Dalam penyebaran informasi mempunyai tantangan tersNegara dan Reformasi Birokrasi melalui system Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel. Evaluasi SPBE merupakan proses penilaian terhadap penyelenggaraan Pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna yang diselenggarakan oleh Instansi pemerintah dalam hal ini Kemeterian Lembaga dan Pemerintahan Daerah. Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang SPBE dan peraturan Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi Nomor. 59 tahun 2020 bahwa lingkup pelaksanaan SPBE ada 4 domain. Domain tersebut antara lain domain kebijakan (aspek kebijakan tat kelola dan aspek kebijakan pelayanan), domain tata kelola ( aspek kelembagaan, aspek strategi dan perencanaan aspek TIK), dan domain layanan ( aspek administrasi pemerintah dan aspek pelayanan publik). Pemanfaatan TIK dalam Dinas Kominfo meliputi infrastruktur jaringan,aplikasi dan keamanan informasi.

Merujuk pada RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029, maka Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Sumatera Utara tahun 2026 dapat diuraikan sebagai berikut: Visi yang ingin dicapai yaitu “Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera Utara yang Unggul, Maju dan Berkelanjutan”. Pencapaian visi ini diuraikan melalui 5 (lima) Misi (Pilar) Pembangunan yaitu:

Misi 1 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Misi 2 Menjaga Stabilitas Makro Ekonomi Daerah

Misi 3 Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

Misi 4 Mengembangkan dan Menata Infrastruktur yang berkualitas, Estetik dan Ramah Lingkungan

Misi 5 Memperkuat ketahanan sosial dan budaya untuk membangun Masyarakat Sumut yang Tangguh

Dalam pencapaian visi dan misi tersebut diatas maka ditetapkanlah 6 (enam) Program Hasil Terbaik Cepat (Quick Win), yaitu:

#### 1. Penyediaan SDM Unggul yang Siap Bekerja

Pemerintah memiliki peran kunci dalam membangun sumber daya manusia unggul dan siap kerja. Salah satu langkah besar yang diambil adalah memberikan akses dan jaminan keberlanjutan pendidikan bagi masyarakat Sumatera Utara ke jenjang SMA/SMK. Selain itu, pemerintah juga perlu melakukan penyesuaian kurikulum SMA/SMK untuk memastikan pembelajaran yang lebih aplikatif dan relevan agar diperoleh peningkatan keterampilan teknis dan soft skills yang lebih fokus untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha dan dunia industri melalui jurusan – jurusan unggulan sesuai dengan potensi dan kebutuhan pasar kerja. Kehadiran Pemerintah diperlukan untuk melakukan kerjasama dengan sektor swasta melalui program magang, praktik kerja dan kepastian memperoleh jaminan pekerjaan khususnya pada siswa/i yang mempunyai prestasi. Akses beasiswa perlu diberikan kepada siswa SMA/SMK dan SLB yang kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan sampai dengan 13 tahun. Setiap sekolah juga diharapkan dapat mencetak atlet-atlet unggul melalui pengembangan program olahraga andalan yang dirancang untuk meraih prestasi di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Prestasi olahraga ini dimulai dari pencarian bakat sejak dini, disertai dengan latihan intensif dan berkelanjutan. Pemerintah mendukung penuh dengan menyediakan pelatih berprestasi, menyelenggarakan kompetisi secara berkala, membangun karakter dan mental juara dalam rangka menghindari bahaya narkoba serta menurunkan angka kriminalitas.

#### 2. Peningkatan kualitas layanan, akses dan jaminan Kesehatan Gratis Bagi Seluruh Penduduk Sumatera Utara dalam rangka peningkatan Usia Harapan Hidup

Peningkatan kualitas layanan kesehatan akan diwujudkan melalui peningkatan kelas Rumah Sakit, ketersediaan Dokter Spesialis dan layanan kesehatan unggulan serta kelengkapan sarana dan prasarana kesehatan.

Jaminan Kesehatan Universal (UHC) adalah sistem yang memastikan setiap orang memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang dibutuhkan tanpa harus mengkhawatirkan biaya. UHC sangat penting untuk memberikan jaminan akses yang setara bagi semua orang, termasuk masyarakat yang kurang mampu. Hal ini tidak hanya dapat meningkatkan kualitas derajat kesehatan masyarakat, tetapi juga bisa mengurangi beban hidup masyarakat berpenghasilan rendah. Lebih dari itu, UHC berperan besar dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Masyarakat yang sehat cenderung lebih produktif, sehingga mereka bisa bekerja lebih efisien dan memberikan kontribusi lebih besar pada perekonomian daerah. Dengan mengurangi beban penyakit dan meningkatkan produktivitas, UHC mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, UHC juga memperkuat kesiapan Sumatera Utara dalam menghadapi krisis kesehatan di masa depan, dengan sistem kesehatan yang lebih kokoh dan responsif terhadap wabah atau pandemi, sekaligus sebagai upaya peningkatan usia harapan hidup.

### 3. Peningkatan Produktivitas Pangan dan Kesejahteraan Petani

Peningkatan produktivitas pangan bisa dicapai melalui ketersediaan pupuk, teknologi pertanian dan infrastruktur yang berkualitas. Disamping itu, akses terhadap pembiayaan dan kredit dengan bunga rendah serta program asuransi pertanian membantu petani menjaga stabilitas penghasilan petani. Namun, produktivitas pangan juga harus diimbangi dengan sistem distribusi yang baik dan harga jual yang stabil. Selain petani, peningkatan kesejahteraan nelayan juga dilakukan melalui kebijakan yang meliputi akses teknologi perikanan modern, penguatan infrastruktur, pembiayaan, perlindungan sosial, dan diversifikasi pendapatan. Kebijakan ini sejalan dengan konsep ekonomi biru yang berfokus pada pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan. Dengan teknologi efisien dan ramah lingkungan, serta perlindungan ekosistem laut diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan penghasilan nelayan sebagai upaya mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan di kawasan pesisir, menciptakan peluang ekonomi baru dan ketahanan pangan nasional.

#### 4. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan melalui Birokrasi yang Responsif, Lincah dan Memahami Kebutuhan

Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui penguatan birokrasi yang cepat tanggap, fleksibel, adaptif terhadap regulasi, teknologi, permasalahan dan kebutuhan masyarakat dengan menghadirkan solusi dan layanan pembangunan yang tepat, segera serta inovatif.

#### 5. Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur Merata, Terhubung dan Ramah Lingkungan

Pemerintah Sumatera Utara terus mengakselerasi pembangunan infrastruktur yang merata, terhubung, dan berkelanjutan melalui pendekatan yang menyeluruh dan strategis. Langkah ini tak hanya berfokus pada penyediaan infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan, irigasi, sekolah, rumah sakit, jaringan listrik, rumah layak huni, sanitasi dan ketersediaan air bersih tetapi juga memastikan bahwa semua wilayah, termasuk daerah terpencil dan pedesaan dapat terhubung untuk memastikan kelancaran transportasi dan distribusi barang maupun jasa di seluruh wilayah Sumatera Utara. Infrastruktur kemantapan jalan, akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan merupakan prioritas utama untuk memberikan jaminan pemerataan pembangunan. Melalui fokus prioritas pembangunan infrastruktur tersebut diharapkan dapat menghubungkan wilayah perkotaan, pedesaan hingga daerah tertinggal serta memperlancar mobilitas barang dan manusia dari sentra-sentra produksi seperti pertanian, perikanan, dan industri kecil menuju pasar-pasar besar dan pusat distribusi sehingga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Komitmen terhadap infrastruktur yang ramah lingkungan dan estetik serta mengadopsi teknologi hijau dan prinsip keberlanjutan melalui pemanfaatan teknologi hemat energi dan energi terbarukan. Gedung hijau dan sistem transportasi ramah lingkungan juga ditekankan untuk mengurangi jejak karbon dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih.

## 6. Meningkatkan Peran Desa Dan Keterlibatan Masyarakat Untuk Menghasilkan Kemajuan Daerah

Meningkatkan peran desa dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan menjadi kata kunci untuk menciptakan kemajuan di seluruh daerah. Salah satu strategi efektif adalah mengembangkan potensi unggulan desa dan pariwisata yang berbasis pada kekayaan budaya dan kearifan lokal. Dengan mengenali dan memaksimalkan produk unggulan desa, seperti pertanian berbasis keunggulan lokal, kerajinan tangan yang unik, dan kuliner khas, desa dapat menciptakan sumber pendapatan yang berkelanjutan. Ini tidak hanya meningkatkan ekonomi desa tetapi juga memperkuat identitas budaya lokal. Melalui pembentukan role model pengembangan desa diharapkan mampu menularkan praktik baik bagi desa-desa lainnya di wilayah Sumatera Utara. Selanjutnya Pemerintah juga hadir memberikan pendampingan dan pelatihan dalam produksi, pemasaran, dan manajemen bisnis yang diberikan kepada masyarakat desa akan meningkatkan kualitas dan daya saing produk, baik di pasar lokal maupun internasional dan memperluas, hal ini juga meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam mengelola potensi lokal dengan lebih efektif. Pemberian insentif pada desa-desa yang memiliki kinerja baik diharapkan memacu setiap desa dapat melakukan percepatan pengembangan pembangunan pada wilayah masing-masing. Di sisi lain, pengembangan desa wisata berbasis budaya, kearifan lokal dan alam dapat menjadi penggerak ekonomi lokal yang kuat. Dengan dukungan pemerintah dalam bentuk peningkatan infrastruktur, pelatihan masyarakat dan promosi pariwisata, desa diharapkan dapat menarik wisatawan yang mencari pengalaman otentik. Tentunya hal ini akan menciptakan lapangan kerja baru dan membuka peluang bisnis bagi usaha lokal seperti homestay, pemandu wisata, dan kuliner khas. Dengan pemasaran yang tepat dan pelestarian lingkungan serta budaya lokal, kemajuan pembangunan di daerah dapat berkembang secara berkelanjutan tanpa merusak aset alami dan budaya yang menjadi daya tarik utama serta melahirkan pembangunan ekonomi yang inklusif.

Pencapaian Visi Misi Pembangunan Sumatera Utara Tahun 2025-2029 dilaksanakan dalam rangka mendukung Trisula Program Pembangunan RPJMN Tahun 2025-2029, yaitu: Pertumbuhan Tinggi Berkelanjutan, Penurunan Kemiskinan dan Sumber Daya Manusia Berkualitas yang akan dilakukan dengan strategi pengembangan wilayah Pertumbuhan dan Pemerataan, Kolaborasi Pembangunan Daerah.

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

Pada Urusan Komunikasi dan Informatika Kebijakan tentang pentingnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di lingkungan pemerintahan, baik pusat maupun daerah yang setiap tahunnya dievaluasi oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur

Dalam penyebaran informasi mempunyai tantangan dan Reformasi Birokrasi melalui system Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel. Evaluasi SPBE merupakan proses penilaian terhadap penyelenggaraan Pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna yang diselenggarakan oleh Instansi pemerintah dalam hal ini Kementerian Lembaga dan Pemerintahan Daerah. Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang SPBE dan peraturan Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi Nomor. 59 tahun 2020 bahwa lingkup pelaksanaan SPBE ada 4 domain. Domain tersebut antara lain domain kebijakan (aspek kebijakan tata kelola dan aspek kebijakan pelayanan), domain tata kelola ( aspek kelembagaan, aspek strategi dan perencanaan aspek TIK), dan domain layanan ( aspek administrasi pemerintah dan aspek pelayanan publik).

Pemanfaatan TIK dalam Dinas Kominfo meliputi infrastruktur jaringan, aplikasi dan keamanan informasi.

Dalam penyebaran informasi belum semua desa terjangkau sarana Daerah.. Melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Sumatera Utara dalam membangun

akses komunikasi dan informasi ke desa desa dilakukan dengan memberdayakan Lembaga Komunikasi Sosial yang diantaranya melalui Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) adalah sebagai simpul komunikasi antara pemerintah dan masyarakat yang berperan sebagai penyebar (*disseminator*) informasi kepada masyarakat. Dikarenakan melalui media ini, masyarakat akan lebih mudah menerima dan menyerap informasi.

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara.**

Tujuan pembangunan urusan komunikasi dan informatika yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika adalah meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Perwujudan dari penguatan kebijakan ketatalaksanaan untuk mendorong proses birokrasi yang sederhana, cepat dan terintegrasi serta membuka ruang partisipasi publik adalah dengan mendorong implementasi teknologi untuk melahirkan kreatifitas dan inovasi dalam membantu proses penyelesaian masalah prioritas dan sektor unggulan daerah, berbasis data yang terintegrasi dan kolaboratif antar wilayah untuk mengakselerasi terwujudnya kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera, sehat, nyaman dan aman.

Tugas dan fungsi Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara, menangani tiga Urusan yaitu : urusan Komunikasi dan Informatika, urusan Persandian dan Urusan Statistik, dengan demikian Tujuannya adalah :

1. Terwujudnya transformasi layanan publik berbasis digital
2. Terwujudnya Layanan Statistik yang akurat dan dapat diandalkan
3. Meningkatnya keamanan Informasi .

Sedangkan sasaran Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara adalah :

1. Peningkatan Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
2. Peningkatan Satu data digital
3. Peningkatan pengelolaan Persandian dan keamanan Informasi

### 3.3. Program dan Kegiatan

Pada dasarnya program dan kegiatan merupakan upaya guna mengimplementasikan strategi dan kebijakan OPD dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah direncanakan. Dengan kata lain bahwa program merupakan instrument dari suatu kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan oleh OPD atau merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program. Selanjutnya pada program dan kegiatan haruslah memiliki alat ukur yang jelas dan dibuat guna menilai tingkat keberhasilan dan kegagalan pada suatu program dan kegiatan yang disebut dengan indikator kinerja. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan dari suatu program dan kegiatan baik secara kualitatif (tolak ukur) maupun kuantitatif (target kinerja) yang secara khusus dinyatakan sebagai bentuk pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat pemantauan atau evaluasi. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara juga mengelola keluhan, saran, kritik dan masukan dari masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan Publik. Pemantauan aduan dilakukan dengan cara mengumpulkan aduan masyarakat melalui sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SPAN LAPOR), aduan juga dapat diterima melalui knsi-ksnsi lainnya seperti call center, aplikasi pengaduan, media sosial, ataupun dapat secara langsung, kemudian aduan yang masuk dilakukan analisis untuk menyusun rekomendasi Komunikasi mendukung arah kebijaksanaan Pemerintah Daerah.

Untuk Program dan Kegiatan Tahun 2024 telah menyesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yaitu

1. Program penunjang urusan Pemerintah Daerah Provinsi

Kegiatan :

6.1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub kegiatan :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat Daerah

- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
  - Evaluasi Kinerja perangkat Daerah
- 6.1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan :
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- 6.1.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan :
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 6.1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan :
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 6.1.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Sub Kegiatan :
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 6.1.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Sub Kegiatan :
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

#### 6.1.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

### 2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi publik

Kegiatan :

#### b) Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi

Sub Kegiatan :

- Monitoring Informasi Kebijakan, Opini dan Aspirasi Publik
- Penyusunan Konten
- Pengelolaan Media Komunikasi Publik
- Pelayanan Informasi Publik
- Relasi Media
- Penguatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Komunikasi Publik
- Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam rangka penyelesaian sengketa informasi publik
- Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat

### 3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Kegiatan :

#### a) Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi

Sub Kegiatan :

- Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah
- Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional

- Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana , proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE pemerintah daerah
- Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan
- Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas
- Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi
- Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi

#### 4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Kegiatan :

##### b) Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi

Sub Kegiatan :

- Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia
- Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral
- Pengelolaan kegiatan statistik sektoral dalam sistem statistik nasional
- Peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral
- Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar

#### 5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Kegiatan :

##### a) Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi

Sub Kegiatan :

- Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah
- Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan
- Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
- Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah

b) Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Provinsi

- Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah

Ada 5 (lima) program Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara yang merupakan penjabaran dari Permen Kominfo RI nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika yang kemudian dituangkan pada Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dalam rangka mendukung program Strategis Provinsi Kolaborasi Sumut Berkah ada beberapa intervensi yang dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara yang terdapat pada Prioritas Pembangunan 11 yaitu Transformasi digital dan Inovasi Teknologi pada Pelayanan Publik melalui :Program Digitalisasi Layanan Publik :

a. Implementasi Teknologi pada Sistem Manajemen data terintegrasi

- Pengembangan infrastruktur digital publik melalui portal layanan online, system Penghubung layanan Pemerintah (SPLP) serta integrasi Single Sign-On (SSO) yang diakomodir pada program Pengelolaan Aplikasi Informatika
- Penguatan keamanan dan pengelolaan data terpusat melalui Security Operation Center (SOC) dan API yang diakomodir pada program persandian untuk Pengamanan Informasi

b. Aplikasi Layanan Publik Online untuk meningkatkan Efisiensi Administrasi pada Program Aplikasi Informatika adalah :

- Digitalisasi proses administrasi layanan publik untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi
- Pengebangan Smart Province sebagai layanan public terintegrasi untuk Pendidikan , Kesehatan dan social

c. Penguatan Infrastruktur jaringan internet hingga daerah terpencil

- Pembangunan jaringan internet publik untuk sekolah, fasilitas kesehatan dan balai desa di 33 kabupaten/kota
- Penyediaan wifi gratis difasilitas umum untuk mendukung akses layanan digital masyarakat

**Indikator Kinerja Utama Dinas Kominfo Provsu Tahun 2025 - 2030**

No	Urusan	Indikator	Satuan	Target Tahun Ke-					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	<b>Urusan Komunikasi dan Informatika</b>	Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah	Point	50	51	51,5	52	53	53
		Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei)	Angka	77	79	81	83	85	87
	<b>Urusan Statistik</b>	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	2,00	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6
	<b>Urusan Persandian</b>	Indeks SPBE (terkait keamanan)	Poin	3,89	3,9	3,9	4,0	4,0	4,0
		Tingkat kesiapan pengamanan informasi Pemerintah Daerah	Angka	455	470	480	490	500	550

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2026 mempunyai 5 program 12 kegiatan dan 45 sub kegiatan. Program yang mendukung dalam pencapaian sasaran ada 4 program sedangkan 1 program sebagai pendukung yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Sedangkan program yang mendukung capaian sasaran ada 4 yaitu Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik, dan Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah dan Program Pengelolaan aplikasi Informatika.

Usulan pendanaan untuk Program dan Kegiatan Dinas Kominfo Provsu TA. 2026 adalah sebesar Rp 70.502.478.891,- Secara rinci uraian rencana program dan kegiatan serta kebutuhan dana / pagu indikatif serta perakiraan maju Tahun 2027 dilihat ada tabel 3.2 dalam lampiran berikut ini :

**Tabel 3.2**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2026**  
**dan Prakiraan Maju Tahun 2027**

Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1	25				Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika								
1	25	01			Dinas Komunikasi dan Informatika Provsu			70.502.478.891	PAD			71.002.478.891	
		01	I.		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI</b>	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Kota Medan	93%	25.193.299.005	PAD		93%	25.693.299.005
			1.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Yang Dihasilkan	Kota Medan	10 dokumen	51.250.900	PAD		10 dokumen	108.050.900
				1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Medan	1 dokumen	22.200.000	PAD		1 dokumen	22.200.000

					2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Medan	2 dokumen	19.655.900	PAD		2 dokumen	19.655.900
					3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Medan	7 laporan	9.395.000	PAD		7 laporan	9.395.000
				2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Yang Dihasilkan	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Yang Dihasilkan	Kota Medan	15 laporan	<b>10.738.796.300</b>	PAD		15 laporan	<b>10.738.796.300</b>
					1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Medan	79 orang	10.683.709.000	PAD		79 orang	10.683.709.000
					2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Medan	1 laporan	40.599.350	PAD		1 laporan	40.599.350
					3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Medan	14 laporan	14.487.950	PAD		14 laporan	14.487.950
				3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Medan	12 orang	<b>773.528.531</b>	PAD		12 orang	<b>773.528.531</b>

					1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Medan	12 orang	773.528.531	PAD		12 orang	773.528.531
				4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Adminstrasi Umum Perangkat Daerah		Kota Medan	12 bulan	<b>3.296.956.146</b>	PAD		12 bulan	<b>3.296.956.146</b>
					1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Medan	12 paket	13.722.390	PAD		12 paket	13.722.390
					2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Medan	12 paket	73.103.583	PAD		12 paket	73.103.583
					3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Medan	12 paket	52.731.778	PAD		12 paket	52.731.778
					4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Medan	12 paket	23.233.500	PAD		12 paket	23.233.500
					5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Medan	288 dokumen	45.071.500	PAD		288 dokumen	45.071.500
					6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Medan	1265 laporan	3.089.093.395	PAD		1265 laporan	3.089.093.395

				5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Medan	3 unit	<b>1.361.024.620</b>	PAD		3 unit	<b>1.361.024.620</b>
				1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Medan	3 unit	1.361.024.620	PAD		3 unit	1.361.024.620
				6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Medan	236 laporan	<b>7.391.619.248</b>	PAD		236 laporan	<b>7.391.619.248</b>
				1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Medan	200 laporan	14.000.000	PAD		200 laporan	14.000.000
				2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Medan	24 laporan	512.500.000	PAD		24 laporan	512.500.000
				3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Medan	12 laporan	6.865.119.248	PAD		12 laporan	6.865.119.248
				7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Medan	52 unit	<b>1.580.123.260</b>	PAD		52 unit	<b>2.080.123.260</b>
				1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Medan	50 unit	1.368.038.992	PAD		50 unit	1.868.038.992

					2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Medan	1 unit	6.394.268	PAD		1 unit	6.394.268
					3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Medan	1 unit	205.690.000	PAD		1 unit	205.690.000
					<b>II.</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>Terwujudnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik</b>	<b>Sumatera Utara</b>	<b>87%</b>	<b>17.275.461.000</b>	<b>PAD</b>		<b>87%</b>	<b>17.275.461.000</b>
					1.	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Tersebarinya Informasi dan Kebijakan Tentang Program Prioritas Pemerintah	<b>Sumatera Utara</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>17.275.461.000</b>	<b>PAD</b>		<b>12 Bulan</b>	<b>17.275.461.000</b>
					1	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	Sumatera Utara	36 Rekomendasi	1.141.105.000	PAD		36 Rekomendasi	1.141.105.000
					2	Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	Sumatera Utara	900 Konten	750.640.000	PAD		900 Konten	750.640.000
					3	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Sumatera Utara	12 Media	11.172.882.700	PAD		12 Media	11.172.882.700

					4	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Kota Medan	12 Permohonan	537.500.000	PAD		12 Permohonan	537.500.000
					5	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	Sumatera Utara	50 Laporan	755.510.000	PAD		50 Laporan	755.510.000
					6	Penguatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	Kota Medan	12 Orang	9.000.000	PAD		12 Orang	9.000.000
					7	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam rangka penyelesaian sengketa informasi publik	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	Kota Medan	12 Laporan	2.902.823.300	PAD		12 Laporan	2.902.823.300
					8	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	Kota Medan	12 Komunitas	6.000.000	PAD		12 Komunitas	6.000.000
				III.	<b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dankomunikasi</b>	<b>Kota Medan</b>	<b>93%</b>	<b>18.490.212.170</b>	<b>PAD</b>		<b>93%</b>	<b>18.490.212.170</b>	

				1.	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Terkelolanya e-Government di Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan	12 bulan	18.490.212.170	PAD		12 bulan	18.490.212.170
				1	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali	Kota Medan	1 Laporan	1.714.400.000	PAD		1 Laporan	1.714.400.000
				2	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	Kota Medan	1 Aplikasi	50.221.127	PAD		1 Aplikasi	50.221.127
				3	Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana , proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE pemerintah daerah	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Kota Medan	1 dokumen	240.092.668	PAD		1 dokumen	240.092.668
				4	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Kota Medan	1 Aplikasi	12.200.000	PAD		1 Aplikasi	12.200.000
				5	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Provinsi Cerdas	Kota Medan	1 dokumen	8.733.979.375	PAD		1 dokumen	8.733.979.375

					6	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	Kota Medan	1 dokumen	411.719.000	PAD		1 dokumen	411.719.000
					7	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Kota Medan	42 Perangkat Daerah	7.327.600.000	PAD		42 Perangkat Daerah	7.327.600.000
					<b>IV.</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	<b>Terwujudnya data statistik sektoral</b>	<b>Kota Medan</b>	<b>94%</b>	<b>1.822.186.190</b>	<b>PAD</b>		<b>94%</b>	<b>1.822.186.190</b>
					1.	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Terlaksananya Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkungan Pemprov	<b>Kota Medan</b>	<b>12 bulan</b>	<b>1.822.186.190</b>	<b>PAD</b>		<b>12 bulan</b>	<b>1.822.186.190</b>
					1	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	Kota Medan	50%	288.874.450	PAD		50%	288.874.450
					2	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	Kota Medan	50%	246.624.450	PAD		50%	246.624.450
					3	Pengelolaan kegiatan statistik sektoral dalam sistem statistik nasional	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	Kota Medan	98%	734.813.940	PAD		98%	734.813.940

					4	Peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	Kota Medan	50 Orang	305.248.900	PAD		50 Orang	305.248.900
					5	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	Kota Medan	10%	246.624.450	PAD		10%	246.624.450
					<b>V.</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	<b>Terwujudnya peningkatan persandian dan keamanan informasi</b>	<b>Medan</b>	<b>88%</b>	<b>7.721.320.526</b>	<b>PAD</b>		<b>88%</b>	<b>7.721.320.526</b>
					<b>1.</b>	<b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi</b>	<b>Terselenggaranya Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi</b>	<b>Kota Medan</b>	<b>12 bulan</b>	<b>7.721.320.526</b>	<b>PAD</b>		<b>12 bulan</b>	<b>7.721.320.526</b>
					1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian.	Kota Medan	1 dokumen	188.600.000	PAD		1 dokumen	188.600.000

					2	Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Kota Medan	1 laporan	300.000.000	PAD		1 laporan	300.000.000
					3	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kota Medan	42 laporan	7.109.220.526	PAD		42 laporan	7.109.220.526
					4	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	Kota Medan	4 perangkat daerah	90.000.000	PAD		4 perangkat daerah	90.000.000
					<b>2</b>	<b>Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Provinsi</b>	<b>Terlaksananya Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi</b>	<b>Kota Medan</b>	<b>12 bulan</b>	<b>33.500.000</b>	<b>PAD</b>		<b>12 bulan</b>	<b>33.100.000</b>
					1	Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah.	Kota Medan	1 Kegiatan	33.500.000	PAD		1 Kegiatan	33.500.000

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara ini dimaksudkan untuk dijadikan dokumen perencanaan yang disusun sesuai dengan kebutuhan dan sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan urusan bidang Komunikasi dan Informatika

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan komunikasi dan informatika yang diemban Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara sebagai salah satu OPD di lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Rancangan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara.

Semoga Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara tahun 2026 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2026.

Untuk mencapai pelayanan yang optimal, pemerintahan daerah selaku penyelenggara urusan harus dapat memproses dan melaksanakan hak dan kewajiban berdasarkan asas-asas pemerintahan yang baik (good Government). Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara menyelenggarakan 3 (tiga) urusan yaitu Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Statistik dan Urusan Persandian.